



Revolusi EDSA: Bentuk Perlawanan Rakyat Terhadap Rezim Otoriter di Filipina

¹Muhammad Miftachul Darojat

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. tachul30@student.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

EDSA Revolution, authoritarianism, people's movement, Ferdinand Marcos.

Kata kunci:

Kata Kunci: Revolusi EDSA, otoritarianisme, gerakan rakyat, Ferdinand Marcos.

How to cite:

Darojat, M. M. (2025). Revolusi EDSA: Bentuk Perlawanan Terhadap Rezim Otoriter di Filipina. *Jambura History and Culture Journal*, 7 (1), 24-47.

DOI:

10.37905/jhcj.v7i1.27867

Submitted : 13 Oktober 2024

Accepted : 27 Januari 2024

Published : 31 Januari 2024

ABSTRACT

The EDSA Revolution, or People Power Revolution, that took place in the Philippines in 1986 is one of the most important examples of a people's movement that successfully overthrew an authoritarian regime without violence. The movement emerged in response to the two-decade-long dictatorship of Ferdinand Marcos. Driven by electoral fraud, socio-economic discontent, and political repression, millions of Filipinos joined the peaceful protests that ultimately ended Marcos' rule. This paper will discuss the political, economic, and social background that sparked the revolution, the chronology of events, the role of civil society and the Catholic Church, and the long-term impact of the EDSA Revolution on the Philippines and similar movements around the world.

ABSTRAK

Revolusi EDSA, atau Revolusi Kekuatan Rakyat, yang berlangsung di Filipina pada tahun 1986 adalah salah satu contoh penting dari gerakan rakyat yang berhasil menggulingkan rezim otoriter tanpa kekerasan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap pemerintahan diktator Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama dua dekade. Dengan didorong oleh penipuan pemilu, ketidakpuasan sosial-ekonomi, dan represi politik, jutaan rakyat Filipina bergabung dalam protes damai yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Marcos. Jurnal ini akan membahas latar belakang politik, ekonomi, dan sosial yang memicu revolusi, kronologi peristiwa, peran masyarakat sipil dan Gereja Katolik, serta dampak jangka panjang Revolusi EDSA bagi Filipina dan gerakan serupa di dunia.

Copyright © 2024 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik dan sosial yang dinamis. Salah satu peristiwa besar yang paling berpengaruh dalam sejarah negara tersebut adalah Revolusi EDSA (Epifanio de los Santos Avenue) yang terjadi pada tahun 1986. Revolusi ini merupakan puncak dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos yang telah memerintah selama lebih dari dua dekade. Marcos dikenal sebagai seorang pemimpin yang awalnya dipuji karena kebijakan pembangunannya, namun di kemudian hari ia dinilai sebagai diktator yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan kebebasan, melakukan korupsi, dan memberangus lawan politik. Oleh karena itu, Revolusi EDSA dianggap sebagai bentuk nyata dari perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter.

Kajian mengenai Revolusi EDSA telah banyak dilakukan oleh berbagai sejarawan, ilmuwan politik, dan sosiolog, baik di dalam maupun luar Filipina. Dalam kajian sebelumnya, seperti yang dibahas oleh Anderson (1988), Revolusi EDSA sering dipahami sebagai sebuah peristiwa yang tidak hanya melibatkan perubahan kekuasaan politik, tetapi juga perubahan sosial yang mendasar di Filipina. Anderson berpendapat bahwa keberhasilan revolusi tersebut merupakan hasil dari kolaborasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, gereja, hingga militer yang berbalik melawan Marcos. Hal ini juga ditegaskan oleh Thompson (1995), yang menambahkan bahwa kekuatan rakyat (*people power*) yang muncul selama Revolusi EDSA memberikan model baru dalam memahami gerakan pro-demokrasi di Asia Tenggara.

Lebih lanjut, Abinales dan Amoroso (2005) menjelaskan bahwa Revolusi EDSA menjadi tonggak penting dalam proses transisi demokrasi di Filipina. Mereka menyoroti bagaimana peristiwa ini membuka jalan bagi Filipina untuk membangun kembali institusi demokratis setelah bertahun-tahun dikuasai oleh rezim otoriter. Dalam konteks ini, Revolusi EDSA tidak hanya dipandang sebagai sebuah revolusi politik, tetapi juga sebagai revolusi sosial yang

menegaskan pentingnya peran rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, meskipun banyak penelitian yang telah membahas aspek politik dan sosial dari Revolusi EDSA, kajian mengenai dimensi kebudayaan dan dampak jangka panjang dari revolusi ini masih relatif terbatas. Misalnya, terdapat minim kajian yang mendalam tentang bagaimana Revolusi EDSA mempengaruhi identitas nasional Filipina dan bagaimana revolusi ini dipahami oleh generasi yang lebih muda. Dalam karya-karya sebelumnya, seperti yang diulas oleh McCoy (2009), meskipun Revolusi EDSA sering disebut sebagai simbol keberhasilan demokrasi, masih ada perdebatan mengenai sejauh mana revolusi ini berhasil mewujudkan reformasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini akan berupaya memberikan kebaruan ilmiah dengan menyoroti dimensi yang belum banyak dikaji dalam studi Revolusi EDSA, yakni bagaimana perlawanan rakyat selama revolusi tersebut merefleksikan dinamika sosial, politik, dan kebudayaan Filipina pada periode tersebut. Kebaruan ini penting mengingat Revolusi EDSA sering kali hanya dipahami dalam konteks politis semata, sementara aspek-aspek sosial dan kebudayaan yang mendasari revolusi ini belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan bagaimana memori kolektif tentang Revolusi EDSA terus dipertahankan dan dipahami oleh masyarakat Filipina hingga hari ini. Dengan demikian, penelitian ini akan menambahkan perspektif baru dalam kajian tentang Revolusi EDSA, terutama dengan melihat peran kebudayaan dan memori sejarah dalam mempertahankan narasi revolusi tersebut di tengah perubahan politik dan sosial yang terjadi setelah revolusi.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana Revolusi EDSA merefleksikan perlawanan rakyat terhadap rezim otoriter, dan sejauh mana perlawanan tersebut berdampak pada perubahan sosial dan politik di Filipina? Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana revolusi ini mempengaruhi dinamika kebudayaan dan memori kolektif di Filipina. Berdasarkan permasalahan ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa Revolusi EDSA tidak hanya berperan dalam menggulingkan

rezim otoriter Marcos, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat Filipina yang terus dirasakan hingga hari ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran perlawanan rakyat dalam Revolusi EDSA dan dampaknya terhadap perubahan sosial-politik di Filipina. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Revolusi EDSA diingat dan dipahami oleh masyarakat Filipina, serta bagaimana memori tentang revolusi ini mempengaruhi perkembangan politik dan kebudayaan di negara tersebut setelah revolusi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam studi tentang gerakan pro-demokrasi dan revolusi rakyat di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks Filipina. Dengan mengeksplorasi aspek sosial, budaya, dan memori kolektif yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kita tentang Revolusi EDSA sebagai salah satu peristiwa bersejarah yang penting dalam sejarah modern Filipina.

2. Metode Penelitian

Dalam jurnal ini saya menggunakan Metode penelitian studi literatur yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis dan mendalam guna mengkaji fenomena atau peristiwa tertentu, dalam hal ini saya membahas mengenai Revolusi EDSA (People Power Revolution) di Filipina. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menyintesis berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan, dan dokumen resmi, yang relevan dengan topik Revolusi EDSA. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks historis, penyebab, dan dampak dari peristiwa tersebut melalui sudut pandang yang komprehensif dari berbagai sumber.

Langkah pertama dalam metode ini adalah melakukan penelusuran literatur secara sistematis. Penelusuran dimulai dengan mengidentifikasi

sumber-sumber yang paling relevan terkait dengan Revolusi EDSA, termasuk karya akademis yang membahas latar belakang politik Filipina, peran tokoh-tokoh utama seperti Corazon Aquino dan Ferdinand Marcos, serta dinamika sosial yang melibatkan gerakan rakyat. Dalam hal ini, literatur yang diterbitkan oleh sejarawan Filipina, serta karya internasional yang membahas gerakan pro-demokrasi di Asia Tenggara, menjadi prioritas utama. Sumber-sumber ini akan diverifikasi berdasarkan kredibilitasnya, misalnya dengan menilai reputasi penulis, penerbit, dan penggunaan data yang valid.

Setelah literatur teridentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi dari setiap sumber. Proses analisis ini melibatkan pembacaan kritis, di mana setiap sumber diperlakukan sebagai bagian dari narasi yang lebih luas mengenai Revolusi EDSA. Sebagai contoh, penelitian ini akan memeriksa bagaimana masing-masing sumber menggambarkan faktor-faktor yang memicu Revolusi EDSA, termasuk isu korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan keterlibatan militer. Sumber yang berbeda mungkin menawarkan perspektif yang berbeda, sehingga penting untuk memahami perbedaan ini dan bagaimana mereka menyumbang pada pemahaman keseluruhan tentang peristiwa tersebut.

Tahap akhir dari metode penelitian ini adalah menyusun hasil sintesis dari berbagai literatur yang telah dianalisis. Sintesis ini akan menyoroti poin-poin utama yang ditemukan dalam penelitian, serta menunjukkan kesenjangan atau kontradiksi dalam literatur yang ada. Hasilnya, penelitian ini akan menawarkan sebuah narasi yang terstruktur mengenai Revolusi EDSA, tidak hanya dari segi kronologis tetapi juga dari sudut pandang sosial-politik yang lebih luas. Penelitian literatur ini juga akan membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai relevansi Revolusi EDSA terhadap gerakan pro-demokrasi di masa kini, serta bagaimana peristiwa ini membentuk identitas politik Filipina pasca-Marcos.

Metode studi literatur ini memungkinkan saya untuk membangun argumen yang kuat berdasarkan bukti dari berbagai sumber serta memberikan

wawasan yang mendalam tentang peristiwa bersejarah, dan menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas.

3. Pembahasan

Dalam pembahasan kali ini berfokus pada Revolusi EDSA di Filipina, yang merupakan peristiwa penting yang menjadi tonggak dalam sejarah politik dan demokrasi negara tersebut. Kondisi politik dan ekonomi Filipina sebelum Revolusi EDSA memberikan latar belakang yang memperjelas mengapa masyarakat Filipina, yang sudah lama tertekan oleh pemerintahan otoriter, mulai mencari perubahan. Pemerintahan Ferdinand Marcos, yang ditandai dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan kemerosotan ekonomi, memicu ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat. Kemudian pada Pemilihan Umum 1986, yang diharapkan bisa menjadi jalan untuk transisi demokrasi, muncul tuduhan kecurangan yang semakin memperburuk ketegangan politik. Kecurangan tersebut sehingga menimbulkan protes besar-besaran yang memicu terjadinya Revolusi EDSA. Gereja Katolik, melalui peran Uskup Agung Manila Kardinal Sin, bersama dengan kelompok masyarakat sipil, memainkan peran kunci dalam memobilisasi rakyat Filipina untuk berpartisipasi dalam revolusi damai ini. Pembahasan ini juga mencakup bagaimana Revolusi EDSA tidak hanya berhasil menggulingkan Marcos, tetapi juga membawa dampak besar terhadap sistem politik Filipina. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam demokratisasi negara, membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, meskipun tantangan terhadap stabilitas demokrasi tetap ada.

3.1. Kondisi Politik dan Ekonomi Filipina Sebelum Revolusi EDSA

Sebelum Revolusi EDSA pada tahun 1986, Filipina berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang dipimpin oleh Ferdinand Marcos, yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 1965. Selama periode ini, negara mengalami tantangan politik dan ekonomi yang mendalam, yang kemudian menjadi salah satu faktor utama pendorong lahirnya revolusi. Marcos awalnya memenangkan dukungan luas, baik di dalam negeri maupun internasional, berkat janji-janji

pembangunan ekonomi dan reformasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintahannya berubah menjadi salah satu rezim paling represif dan korup di Asia Tenggara. Pada dasarnya, kondisi politik dan ekonomi Filipina sebelum Revolusi EDSA dapat digambarkan sebagai era penuh ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketimpangan ekonomi yang akut.

Di bidang politik, Marcos awalnya menjanjikan reformasi dalam sistem pemerintahan Filipina, tetapi ia malah memperpanjang masa kekuasaannya melalui serangkaian tindakan yang melanggar norma demokrasi. Salah satu langkah paling signifikan yang diambil Marcos adalah penerapan darurat militer pada tahun 1972, yang memberi dia wewenang besar untuk mengendalikan negara tanpa hambatan. Melalui tindakan ini, ia membatasi kebebasan berbicara, membubarkan Kongres, menunda pemilu, dan memberlakukan berbagai undang-undang yang semakin menekan oposisi politik. Dengan kekuasaan absolut di tangannya, Marcos menggunakan militer untuk menindas suara-suara yang kritis terhadap pemerintahannya, menahan banyak aktivis politik, wartawan, dan pemimpin oposisi. Pembatasan kebebasan sipil ini menyebabkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat Filipina dan melemahkan struktur institusi demokrasi negara tersebut.

Salah satu aspek yang paling mencolok dari masa kekuasaan Marcos adalah peran kuat dari militer dan kepolisian dalam menjalankan pemerintahan. Institusi-institusi ini menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kekuasaannya. Tidak hanya mereka diberi wewenang untuk menindak keras segala bentuk perlawanan, tetapi mereka juga mendapatkan kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan, yang semakin mengikis keseimbangan kekuasaan. Militer digunakan tidak hanya untuk menekan oposisi politik, tetapi juga untuk mengamankan kepentingan ekonomi Marcos dan kroni-kroninya. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai "crony capitalism," di mana jaringan elit yang dekat dengan Marcos mendapatkan

akses eksklusif ke sumber daya negara dan kontrak-kontrak bisnis yang menguntungkan.

Secara ekonomi, Filipina mengalami periode stagnasi yang panjang, disertai dengan tingkat korupsi yang merajalela. Pada awal pemerintahannya, Marcos berjanji untuk mempercepat modernisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, janji-janji tersebut tidak pernah sepenuhnya terwujud. Meski ada beberapa proyek pembangunan besar yang dilakukan, sebagian besar dari proyek tersebut dimaksudkan untuk memperkuat citra politik Marcos daripada untuk mendorong kesejahteraan ekonomi rakyat. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur mewah seperti Cultural Center of the Philippines dan San Juanico Bridge lebih bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan prestise daripada benar-benar membawa manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi mayoritas rakyat Filipina.

Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat tinggi negara semakin memperparah situasi ekonomi. Marcos dan lingkaran dalamnya, yang terdiri dari keluarga, teman dekat, dan sekutu politik, menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol sektor-sektor strategis dalam perekonomian. Mereka memperkaya diri sendiri dengan cara mengambil alih perusahaan-perusahaan milik negara atau menciptakan monopoli bisnis. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah istri Marcos, Imelda Marcos, yang memainkan peran besar dalam mengendalikan dana publik dan terlibat dalam skandal-skandal besar terkait penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian properti mewah di luar negeri dan pengoleksian barang-barang mewah. Korupsi semacam ini tidak hanya menguras kas negara tetapi juga memperburuk citra Filipina di mata dunia internasional.

Sebagai dampaknya, masyarakat Filipina, terutama kelas pekerja dan petani, semakin tenggelam dalam kemiskinan. Ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Sementara para elit politik dan kroni Marcos menikmati kehidupan yang mewah, sebagian besar rakyat Filipina hidup dalam kondisi yang jauh

dari layak. Kemiskinan pedesaan yang kronis, disertai dengan tingginya pengangguran di kota-kota besar, membuat situasi semakin tidak stabil. Meskipun ada upaya-upaya reformasi agraria yang diumumkan oleh Marcos, implementasinya sangat terbatas dan sebagian besar gagal memberikan dampak positif yang signifikan bagi para petani kecil, yang tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam ranah ekonomi yang lebih luas, Filipina juga menghadapi tantangan serius di sektor perdagangan dan investasi. Meskipun pada awalnya ada harapan bahwa kebijakan Marcos akan menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor, kenyataannya adalah bahwa ketidakstabilan politik dan korupsi yang merajalela justru menakutkan investor. Banyak perusahaan multinasional yang enggan berinvestasi di Filipina karena takut akan ketidakpastian hukum dan potensi pengambilalihan oleh negara. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang pada waktu itu sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Marcos lebih banyak berfokus pada proyek-proyek jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Utang luar negeri Filipina meningkat secara signifikan selama masa pemerintahannya, karena Marcos terus meminjam dari bank-bank internasional untuk mendanai proyek-proyek besar, sebagian besar dari proyek tersebut akhirnya gagal memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Sementara utang terus menumpuk, hasil dari proyek-proyek tersebut tidak mampu meningkatkan pendapatan negara dalam jangka panjang, dan Filipina terjat dalam krisis utang yang memperburuk kondisi ekonominya.

Di tengah situasi yang semakin memburuk ini, oposisi terhadap pemerintahan Marcos mulai tumbuh, baik dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, gereja, maupun para politisi yang kecewa. Meskipun perlawanan terhadap Marcos sering kali dibungkam dengan kekerasan oleh militer, semangat untuk perubahan terus berkobar di bawah permukaan.

Pembunuhan terhadap Benigno "Ninoy" Aquino, salah satu tokoh oposisi paling karismatik, pada tahun 1983, menjadi salah satu titik balik dalam politik Filipina. Pembunuhan ini tidak hanya menggerakkan masyarakat untuk bangkit melawan tirani, tetapi juga menjadi simbol dari ketidakadilan rezim Marcos. Semakin banyak rakyat Filipina yang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bertahan dalam kondisi politik yang represif dan ekonomi yang semakin memburuk.

Gereja Katolik, yang memiliki pengaruh besar di Filipina, juga memainkan peran penting dalam menentang rezim Marcos. Para pemimpin gereja, terutama Kardinal Jaime Sin, mulai secara terbuka mengkritik tindakan Marcos dan mendorong rakyat untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Dengan dukungan dari gereja dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, gerakan untuk menggulingkan Marcos semakin kuat.

Secara keseluruhan, kondisi politik dan ekonomi Filipina sebelum Revolusi EDSA merupakan periode yang ditandai oleh ketidakstabilan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Rezim Marcos, yang awalnya berjanji untuk membawa Filipina menuju kemajuan, malah membawa negara ini ke dalam krisis yang mendalam. Ketidakpuasan rakyat, ketidakadilan yang merajalela, serta pembatasan kebebasan politik dan sipil menciptakan kondisi yang matang untuk revolusi. Revolusi EDSA pada akhirnya menjadi simbol perlawanan rakyat Filipina terhadap tirani dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus menjadi titik balik dalam sejarah politik negara tersebut.

3.2. Pemilihan Umum dan Tuduhan Kecurangan Pada Tahun 1986

Pemilihan Umum 1986 di Filipina merupakan momen penting dalam sejarah negara tersebut, yang diikuti oleh gerakan Revolusi EDSA. Pemilu ini diadakan pada 7 Februari 1986, dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemilu paling kontroversial di Filipina. Pemilihan ini diadakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dengan Ferdinand Marcos mencalonkan diri untuk masa jabatan keenamnya sebagai presiden. Lawan utamanya adalah Corazon Aquino, janda dari pemimpin oposisi yang dibunuh, Benigno "Ninoy"

Aquino Jr. Pemilu ini dirancang untuk mempertahankan kekuasaan Marcos, tetapi malah memicu revolusi damai yang menjatuhkan kekuasaannya dan menandai akhir dari dua dekade pemerintahannya.

Sebelum pemilihan, Filipina berada dalam kondisi politik yang penuh ketegangan. Selama hampir 20 tahun, Marcos memerintah dengan tangan besi, dan rezimnya terkenal dengan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi darurat militer pada 1972 memberinya kekuasaan penuh, dan selama bertahun-tahun ia berhasil menekan oposisi. Namun, pada awal 1980-an, ekonomi Filipina mulai runtuh, dan semakin banyak orang yang menyadari dampak negatif dari kepemimpinannya. Kemarahan rakyat mencapai puncaknya ketika Benigno Aquino, salah satu pemimpin oposisi yang paling menonjol, dibunuh saat kembali dari pengasingan pada 1983. Peristiwa ini memicu gelombang protes dan memperkuat gerakan oposisi, yang pada akhirnya mengangkat Corazon Aquino sebagai simbol perlawanan terhadap Marcos.

Pemilu 1986 dijadikan ajang pertarungan antara dua kekuatan besar: rezim Marcos yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan oposisi yang dipimpin oleh Aquino yang ingin menggulingkannya. Marcos secara terbuka menyatakan bahwa pemilihan ini adalah bentuk referendum terhadap pemerintahannya, namun banyak yang percaya bahwa pemilu ini merupakan upaya Marcos untuk memberikan legitimasi palsu atas kekuasaannya yang sudah mulai goyah. Di sisi lain, Aquino didukung oleh berbagai kalangan yang ingin perubahan, termasuk gereja Katolik, kelompok buruh, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Pada hari pemilihan, laporan mengenai berbagai bentuk kecurangan pemilu mulai bermunculan. Tuduhan-tuduhan ini termasuk intimidasi terhadap pemilih, manipulasi daftar pemilih, pembelian suara, serta kekerasan yang dilakukan oleh militer dan paramiliter yang setia kepada Marcos. Kecurangan yang paling mencolok terjadi dalam penghitungan suara, di mana banyak laporan menyebutkan bahwa hasil yang diumumkan oleh Komisi

Pemilihan Umum (COMELEC) sangat berbeda dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok independen dan media. COMELEC mengumumkan bahwa Marcos menang tipis dengan memperoleh 53 persen suara, sementara Aquino hanya memperoleh 47 persen. Namun, hasil ini segera ditolak oleh Aquino dan pendukungnya, yang menuduh bahwa pemilihan telah dicurangi secara masif. Sebagai respons atas tuduhan kecurangan, Komisi Pemilihan Katolik Nasional (NAMFREL), sebuah kelompok pemantau independen, merilis hasil penghitungan paralelnya yang menunjukkan bahwa Aquino sebenarnya memenangkan pemilu dengan selisih yang signifikan. Perbedaan hasil ini memicu kemarahan rakyat dan memunculkan gerakan protes yang lebih besar. Tuduhan kecurangan ini kemudian memicu salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Filipina modern, yaitu Revolusi EDSA.

Revolusi EDSA, yang juga dikenal sebagai Revolusi Kekuatan Rakyat, berlangsung selama empat hari, dari 22 hingga 25 Februari 1986. Revolusi ini dimulai sebagai reaksi terhadap hasil pemilihan yang dicurigai curang, tetapi dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk menumbangkan rezim Marcos. Ribuan orang dari berbagai kalangan turun ke jalan-jalan di Manila, terutama di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), untuk memprotes kecurangan pemilu dan menuntut pengunduran diri Marcos. Demonstrasi ini sebagian besar damai, meskipun ada ancaman kekerasan dari militer yang loyal kepada Marcos.

Peran media dalam revolusi ini sangat penting. Stasiun radio dan televisi yang independen, seperti Radio Veritas, memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi mengenai perkembangan revolusi dan mendorong rakyat untuk turun ke jalan. Liputan langsung dari EDSA menunjukkan ribuan orang yang dengan damai berhadapan dengan tank dan tentara, menciptakan citra yang kuat tentang perlawanan damai terhadap tirani. Sementara itu, semakin banyak tokoh militer dan politisi yang beralih mendukung Aquino. Salah satu momen penting dalam revolusi ini adalah ketika Menteri Pertahanan

Juan Ponce Enrile dan Jenderal Fidel Ramos, dua tokoh militer penting yang sebelumnya setia kepada Marcos, secara terbuka membelot dan mendukung gerakan oposisi. Pembelotan mereka menjadi sinyal kuat bahwa rezim Marcos semakin goyah dan tidak bisa lagi mengandalkan dukungan militer.

Marcos awalnya menolak untuk menyerah dan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengerahkan militer untuk menindak para demonstran. Namun, di bawah tekanan internasional dan meningkatnya jumlah demonstran, termasuk dukungan yang semakin kuat dari gereja Katolik, Marcos akhirnya tidak punya pilihan selain meninggalkan Filipina. Pada 25 Februari 1986, dengan bantuan Amerika Serikat, Marcos dan keluarganya melarikan diri ke Hawaii, menandai berakhirnya masa pemerintahannya yang penuh kontroversi.

Revolusi EDSA tidak hanya mengakhiri kekuasaan Marcos, tetapi juga menandai kemenangan besar bagi demokrasi di Filipina. Corazon Aquino kemudian diangkat sebagai presiden, dan Filipina memasuki era baru reformasi politik dan demokrasi. Namun, meskipun Revolusi EDSA berhasil menggulingkan Marcos dan memulihkan demokrasi, tantangan yang dihadapi Aquino dalam membangun kembali negara sangat besar. Warisan Marcos dalam bentuk korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan kelemahan institusi politik tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru.

Banyak pengamat internasional memuji Revolusi EDSA sebagai salah satu contoh revolusi damai yang paling berhasil di dunia. Revolusi ini menunjukkan kekuatan rakyat dalam menumbangkan rezim otoriter tanpa menggunakan kekerasan, dan menjadi inspirasi bagi gerakan serupa di berbagai negara lain.

Namun, di balik semua itu, tuduhan kecurangan dalam Pemilihan Umum 1986 tetap menjadi salah satu aspek yang paling kontroversial dari sejarah politik Filipina. Pemilu ini menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi ketika berada di bawah kekuasaan rezim yang korup dan otoriter. Tuduhan kecurangan yang meluas menggarisbawahi betapa pentingnya proses pemilihan yang jujur dan transparan dalam menjaga legitimasi pemerintahan

demokratis. Situasi ini juga memperkuat peran penting masyarakat sipil, media, dan organisasi pemantau pemilu dalam mengawasi proses demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati.

Dengan demikian, Pemilihan Umum 1986 dan tuduhan kecurangan yang menyertainya tidak hanya berfungsi sebagai titik balik dalam sejarah Filipina, tetapi juga sebagai pelajaran penting bagi negara-negara lain tentang pentingnya menjaga integritas pemilihan umum. Revolusi EDSA menjadi simbol kemenangan rakyat melawan tirani, dan pemilu yang curang menjadi pengingat betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika demokrasi dikhianati oleh mereka yang berkuasa.

3.3. Peran Gereja Katolik dan Masyarakat Sipil dalam Revolusi EDSA

Revolusi EDSA (People Power Revolution) di Filipina pada tahun 1986 adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan rakyat melawan kediktatoran. Revolusi ini berhasil menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos dan membuka jalan bagi kembalinya demokrasi di negara tersebut. Dalam peristiwa ini, peran Gereja Katolik dan masyarakat sipil sangat signifikan, baik sebagai kekuatan moral maupun sebagai pendorong mobilisasi massa.

Gereja Katolik Filipina memiliki sejarah panjang yang berperan penting dalam dinamika sosial dan politik negara tersebut. Ketika Marcos semakin menindas lawan-lawan politiknya, Gereja mulai mengambil posisi yang lebih vokal terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi rezimnya. Salah satu tokoh sentral dalam perlawanan ini adalah Kardinal Jaime Sin, Uskup Agung Manila, yang sering kali memberikan bimbingan moral kepada umat Katolik dan mendorong mereka untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan yang tiranik.

Kardinal Sin menggunakan otoritas moral Gereja untuk memobilisasi massa pada saat-saat kritis dalam revolusi. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika ia mengimbau umat Katolik melalui Radio Veritas, sebuah stasiun radio yang dikelola oleh Gereja, untuk turun ke jalan dan mendukung pemberontakan militer yang dipimpin oleh Fidel Ramos dan Juan Ponce Enrile.

Ajakan ini berhasil menarik ratusan ribu warga yang berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), tempat revolusi itu berlangsung.

Di tengah kekerasan yang melingkupi pemerintahan Marcos, Gereja memainkan peran unik sebagai penjaga perdamaian. Para biarawati dan imam-imam ditempatkan di garis depan aksi damai di EDSA, mencegah bentrokan antara militer yang loyal kepada Marcos dan pasukan pemberontak. Mereka tidak hanya hadir sebagai simbol moralitas, tetapi juga secara fisik melindungi massa sipil dari kekerasan lebih lanjut. Sementara Gereja Katolik mengambil peran spiritual dan moral, masyarakat sipil juga memainkan peranan penting dalam melawan kediktatoran. Masyarakat sipil di Filipina saat itu telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan banyak kelompok aktivis yang memperjuangkan reformasi politik dan sosial. Kelompok-kelompok seperti media independen, mahasiswa, pengacara, dan serikat pekerja semuanya terlibat dalam gerakan melawan pemerintahan Marcos.

Media independen, yang telah lama ditekan oleh rezim, menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi tentang korupsi pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia. Radio Veritas, misalnya, berfungsi sebagai satu-satunya sumber berita yang dapat diandalkan ketika media mainstream dikendalikan oleh Marcos. Peran media dalam menggerakkan masyarakat untuk bertindak sangat vital dalam menjaga momentum revolusi. Kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga memainkan peran yang penting dalam memobilisasi massa. Mereka mengadakan demonstrasi dan protes anti-Marcos jauh sebelum revolusi dimulai. Gerakan mahasiswa, yang dipelopori oleh beberapa universitas di Manila, telah menjadi salah satu suara paling vokal dalam menentang korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Marcos. Aksi-aksi mereka membantu menyadarkan publik tentang urgensi perubahan.

Salah satu aspek paling mencolok dari Revolusi EDSA adalah bagaimana massa sipil berhasil mempertahankan aksi damai meski berada di bawah ancaman kekerasan militer. Para demonstran yang turun ke jalan di EDSA tetap

menjaga kedamaian dan menolak menggunakan kekerasan, meskipun mereka menghadapi tank dan senjata militer yang loyal kepada Marcos. Solidaritas masyarakat sipil yang lintas agama, usia, dan status sosial ini menjadi salah satu kunci keberhasilan revolusi. Tindakan-tindakan heroik dari masyarakat sipil dan Gereja dalam Revolusi EDSA adalah bukti dari kekuatan kolektif rakyat yang bersatu dalam melawan ketidakadilan. Mereka menunjukkan bahwa meskipun berhadapan dengan kekuasaan yang represif, suara rakyat tetap dapat menggulingkan kediktatoran jika ada kesatuan dan tekad. Gereja Katolik, melalui bimbingan spiritualnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Filipina dalam momen-momen krisis tersebut.

Revolusi EDSA juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi-institusi keagamaan dalam proses perubahan sosial dan politik. Masyarakat sipil membutuhkan legitimasi moral yang diberikan oleh Gereja Katolik, sementara Gereja memerlukan dukungan dan tindakan konkrit dari masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diusungnya. Hubungan simbiotik ini terbukti menjadi formula yang efektif dalam mengakhiri kediktatoran Marcos.

Setelah kejatuhan Marcos, Gereja dan masyarakat sipil terus berperan aktif dalam transisi Filipina menuju demokrasi. Mereka tidak hanya terlibat dalam pengawasan proses politik, tetapi juga dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Keterlibatan mereka dalam proses ini membantu memastikan bahwa Filipina tidak kembali ke era kediktatoran. Pengaruh Gereja Katolik dalam politik Filipina tidak berhenti pada Revolusi EDSA. Sampai saat ini, Gereja terus memainkan peran penting dalam mengawasi perkembangan politik dan sosial di negara tersebut. Meskipun ada kritik terhadap campur tangan Gereja dalam politik, peran mereka dalam menjaga nilai-nilai moral dan hak asasi manusia di Filipina tetap tidak bisa diabaikan.

Revolusi EDSA merupakan contoh kuat bagaimana gerakan massa damai yang didukung oleh otoritas moral dapat menggulingkan pemerintahan yang represif. Kolaborasi antara Gereja Katolik dan masyarakat sipil dalam peristiwa ini menunjukkan pentingnya kehadiran kekuatan moral dalam proses perubahan sosial dan politik. Gereja Katolik, melalui ajarannya tentang keadilan dan perdamaian, berhasil memobilisasi massa untuk berjuang demi demokrasi dan melawan kediktatoran tanpa menggunakan kekerasan. Di sisi lain, masyarakat sipil, dengan tekad dan keberanian mereka, menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dicapai melalui aksi kolektif yang damai. Mereka membuktikan bahwa ketika rakyat bersatu dalam solidaritas, kekuasaan tirani tidak akan mampu bertahan. Peristiwa ini menjadi inspirasi bagi banyak gerakan pro-demokrasi di seluruh dunia.

Kesuksesan Revolusi EDSA menggarisbawahi peran krusial yang dimainkan oleh Gereja Katolik dan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Filipina. Mereka bersama-sama menjadi simbol perlawanan yang bermoral dan damai terhadap penindasan, yang hingga saat ini tetap menjadi pelajaran penting dalam sejarah perlawanan rakyat terhadap tirani di seluruh dunia.

3.4. Dampak Revolusi EDSA Terhadap Politik dan Demokrasi di Filipina

Revolusi EDSA (Epifanio de los Santos Avenue) atau yang sering disebut sebagai Revolusi Kekuatan Rakyat, merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah politik dan demokrasi Filipina. Revolusi ini terjadi pada Februari 1986 dan berhasil menggulingkan rezim otoriter Ferdinand Marcos, yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade. Revolusi ini memiliki dampak besar terhadap politik dan demokrasi di Filipina, tidak hanya karena keberhasilannya dalam mengakhiri kediktatoran, tetapi juga karena membentuk ulang sistem politik negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan demokratis.

Secara politik, Revolusi EDSA membuka jalan bagi pemulihan demokrasi setelah bertahun-tahun di bawah pemerintahan Marcos yang otoriter. Di bawah

kekuasaannya, Filipina mengalami pelemahan institusi demokrasi, dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan pers, serta penggunaan kekerasan untuk menindas oposisi. Namun, Revolusi EDSA mengakhiri semua ini, memberikan kesempatan bagi rakyat Filipina untuk kembali menikmati kebebasan sipil dan hak-hak politik yang sebelumnya dirampas. Setelah Revolusi EDSA, Corazon Aquino, janda dari Benigno Aquino yang dibunuh, menjadi presiden pertama di era pasca-Marcos. Pemerintahan Aquino mengembalikan demokrasi konstitusional dan memulai reformasi yang bertujuan untuk memulihkan institusi-institusi demokrasi yang telah dihancurkan oleh rezim Marcos. Hal ini termasuk penyusunan Konstitusi 1987, yang menegaskan kembali nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Konstitusi 1987 ini juga memperkenalkan mekanisme untuk mencegah terulangnya kembali otoritarianisme di Filipina, seperti pembatasan masa jabatan presiden hanya selama enam tahun dan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Mahkamah Agung dan Kongres. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu individu, seperti yang terjadi pada masa Marcos.

Di bidang demokrasi, Revolusi EDSA memicu kebangkitan gerakan rakyat dan partisipasi politik masyarakat. Gerakan massa yang terjadi selama revolusi menunjukkan bahwa kekuatan rakyat dapat menggulingkan rezim otoriter tanpa kekerasan. Hal ini mendorong masyarakat Filipina untuk lebih aktif terlibat dalam politik dan memantau kinerja pemerintah, sesuatu yang sangat dibatasi selama masa kediktatoran Marcos. Meski Revolusi EDSA sering dipandang sebagai kemenangan demokrasi, transisi ke pemerintahan yang lebih demokratis tidak selalu berjalan mulus. Filipina masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan kekuatan elit lama yang tetap kuat. Namun, EDSA telah menciptakan ruang untuk perdebatan publik dan partisipasi politik yang lebih luas, meskipun hasilnya kadang-kadang tidak memenuhi harapan idealis revolusi tersebut.

Dampak Revolusi EDSA juga meluas ke bidang kebijakan sosial dan ekonomi. Meskipun salah satu tujuan revolusi adalah memperbaiki ketimpangan sosial, banyak tantangan ekonomi yang tetap ada. Krisis ekonomi yang dihadapi selama era Marcos mewariskan beban yang berat bagi pemerintahan Aquino, dan meskipun ada beberapa reformasi, seperti redistribusi lahan, ketimpangan masih menjadi masalah besar di Filipina pasca-EDSA. Dalam jangka panjang, Revolusi EDSA menciptakan budaya politik yang lebih terbuka. Pemilihan umum yang relatif bebas dan adil menjadi norma, dan media bebas kembali memainkan peran penting dalam politik Filipina. Hal ini sangat berbeda dengan masa pemerintahan Marcos, di mana media dikontrol ketat dan kebebasan berekspresi ditekan. Namun demikian, keberhasilan demokratisasi pasca-EDSA tidak terlepas dari tantangan serius. Salah satu masalah utama adalah lemahnya penegakan hukum dan tingginya tingkat korupsi di pemerintahan. Meskipun Marcos telah digulingkan, banyak elit politik lama tetap berkuasa, dan oligarki tetap memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Filipina.

Revolusi EDSA juga menginspirasi gerakan demokrasi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Misalnya, gerakan ini sering dibandingkan dengan gerakan pro-demokrasi di Indonesia pada akhir 1990-an, yang menggulingkan Suharto, seorang diktator yang memerintah selama lebih dari tiga dekade. Dalam konteks regional, EDSA menunjukkan bahwa perubahan politik dapat dicapai melalui aksi damai tanpa kekerasan. Selain itu, Revolusi EDSA memunculkan peran signifikan dari Gereja Katolik dalam politik Filipina. Selama revolusi, para pemimpin gereja, termasuk Kardinal Jaime Sin, berperan penting dalam mengorganisir gerakan rakyat dan menjaga perdamaian. Gereja Katolik tetap menjadi kekuatan politik yang berpengaruh di Filipina, dan sering kali menjadi penyeimbang moral dalam politik.

Meski demikian, Revolusi EDSA juga memiliki aspek-aspek negatif. Beberapa pengamat berpendapat bahwa revolusi ini gagal menciptakan perubahan struktural yang mendalam. Banyak institusi yang korup tetap ada,

dan meskipun Marcos telah digulingkan, budaya politik patronase dan dinasti politik masih mendominasi Filipina. Hal ini mencerminkan tantangan jangka panjang dalam membangun demokrasi yang lebih substantif. Dalam bidang militer, Revolusi EDSA juga meninggalkan dampak penting. Militer yang semula mendukung rezim Marcos mengalami transformasi, dengan upaya untuk memperkuat subordinasi militer di bawah kontrol sipil. Namun, sepanjang sejarah pasca-EDSA, militer tetap terlibat dalam politik, termasuk beberapa kudeta yang gagal terhadap pemerintahan Aquino. Di sisi lain, revolusi ini juga melahirkan harapan bagi kelompok-kelompok minoritas dan masyarakat pinggiran untuk mendapatkan representasi politik yang lebih baik. Namun, banyak dari harapan ini masih belum terwujud, terutama dalam hal kebijakan redistribusi ekonomi dan keadilan sosial yang lebih merata.

Revolusi EDSA juga menandai peran penting media dalam politik Filipina. Media, yang sebelumnya dibungkam dan dikontrol oleh rezim Marcos, kembali berfungsi sebagai pilar penting demokrasi. Media yang bebas tidak hanya melaporkan perkembangan politik, tetapi juga memainkan peran dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

Dalam dekade-dekade setelah EDSA, Filipina terus mengalami pasang surut demokrasi. Meskipun telah terjadi beberapa kemunduran, terutama terkait dengan munculnya tokoh-tokoh politik populis seperti Joseph Estrada dan Rodrigo Duterte, nilai-nilai demokrasi yang dipelopori oleh Revolusi EDSA tetap menjadi landasan penting dalam politik Filipina. Secara keseluruhan, Revolusi EDSA tidak hanya mengakhiri pemerintahan Marcos, tetapi juga menciptakan era baru dalam politik Filipina. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, revolusi ini telah menanamkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat yang terus mempengaruhi politik negara ini hingga hari ini.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Revolusi EDSA, yang berlangsung pada tahun 1986, adalah momen penting dalam sejarah Filipina yang menunjukkan

kekuatan gerakan rakyat dalam memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Latar belakang revolusi ini berakar dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap rezim otoriter Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade. Pada periode sebelum revolusi, Filipina mengalami kondisi politik yang represif dan ekonomi yang tidak stabil. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Marcos, yang didukung oleh korupsi dan favoritisme, mengakibatkan ketimpangan yang semakin besar di masyarakat. Akibatnya, banyak rakyat Filipina merasa terasing dan terpinggirkan, yang memicu munculnya berbagai gerakan oposisi.

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1986 menjadi titik tolak ketegangan yang semakin meningkat di Filipina. Tuduhan kecurangan yang melanda pemilu tersebut menciptakan suasana ketidakpercayaan di kalangan rakyat terhadap pemerintah. Kemenangan Corazon Aquino, yang dinyatakan oleh banyak pihak sebagai calon yang sah, berhadapan dengan pengumuman kemenangan Marcos yang kontroversial. Kecurangan ini tidak hanya memicu kemarahan rakyat, tetapi juga menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah. Dalam konteks ini, peran Gereja Katolik dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial. Gereja, yang selama ini menjadi tempat berlindung bagi gerakan pro-demokrasi, mengorganisir massa dan memberikan dukungan moral untuk melawan tirani.

Protes damai yang berlangsung di EDSA, yang dikenal dengan nama People Power Revolution, berhasil menarik perhatian dunia. Ribuan orang berkumpul dengan damai, menunjukkan tekad mereka untuk menggulingkan rezim Marcos. Pendekatan damai ini, didukung oleh pemimpin gereja, menunjukkan bahwa rakyat Filipina tidak ingin menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok profesional, pelajar, dan bahkan anggota militer yang membelot, semakin memperkuat gerakan ini. Dalam waktu singkat, tekanan yang terus meningkat akhirnya memaksa Marcos untuk melarikan diri ke luar negeri.

Dampak Revolusi EDSA terhadap politik dan demokrasi di Filipina sangat signifikan. Revolusi ini menandai berakhirnya pemerintahan otoriter dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Corazon Aquino menjadi presiden wanita pertama di Asia, dan kepemimpinannya membawa harapan baru bagi proses demokrasi di Filipina. Meskipun tantangan masih ada, seperti korupsi dan ketidakstabilan politik, revolusi ini membuka jalan bagi reformasi yang lebih besar dalam sistem politik Filipina. Konstitusi baru yang diadopsi pada tahun 1987 mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang transparan.

Namun, perjalanan Filipina menuju demokrasi tidaklah mulus. Meskipun Revolusi EDSA berhasil menggulingkan Marcos, tantangan baru muncul, seperti pengaruh oligarki dan kekuatan militer dalam politik. Selain itu, perpecahan di antara partai politik dan berbagai kelompok masyarakat sipil sering kali menghambat upaya reformasi yang konsisten. Masyarakat sipil, yang berperan penting dalam revolusi, harus terus berjuang untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan politik. Revolusi EDSA juga memberikan inspirasi bagi gerakan demokrasi di negara-negara lain di Asia dan di seluruh dunia. Keberhasilan gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan politik yang damai adalah mungkin, bahkan di bawah rezim yang paling represif sekalipun. Selain itu, EDSA menjadi simbol harapan bagi banyak rakyat yang terpinggirkan, menunjukkan bahwa perjuangan kolektif untuk keadilan dan kebebasan tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa merupakan babak penting dalam sejarah Filipina yang memperlihatkan kekuatan rakyat dalam melawan penindasan. Meskipun Filipina masih menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, warisan dari revolusi ini tetap menjadi pengingat bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan dan dipertahankan. Melalui solidaritas, partisipasi aktif, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, rakyat Filipina dapat terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Revolusi EDSA mengajarkan bahwa perubahan yang signifikan dapat dicapai

melalui aksi kolektif, ketekunan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

5. Daftar Pustaka

- Abinales, P. N., & Amoroso, D. J. (2005). *State and society in the Philippines. Contemporary Southeast Asia*.
- Anderson, B. (1988). Cacique democracy in the Philippines: Origins and dreams. *New Left Review*, 169, 3–31.
- Clarke, G. (1995). *The Catholic Church and democracy in the Philippines*.
- De Silva, M. (2004). *Gereja dan kejatuhan Marcos*. Universiti Malaysia Sabah.
- Ernesta, L. (2023). *Respons Amerika Serikat terhadap Revolusi Epifanio De Los Santos Avenue (EDSA) tahun 1986* (Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan).
- Gonzaga, F. (2009). *People power as immanent collectivity: Re-imagining the miracle of the 1986 EDSA revolution as divine justice* (Doctoral dissertation, University of California, Berkeley).
- Halloran Lumsdaine, D. (2009). *Evangelical Christianity and democracy in Asia*. Oxford University Press.
- Hidayatullah, R. (2022). *Epifanio De Los Santos Avenue (Edsa) Revolution: Perubahan sosial politik Filipina tahun 1983-1992* (S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Hoffman, B. (2019). *People power: The EDSA revolution in Philippine history*. *Philippine Studies*.
- Jison, J. R. (2018). *Mobilizing EDSA people power II in the Philippines: Lessons from the political process theory*. Department of Social Sciences, University of the Philippines Los Baños.
- Lekatompessy, L. (2021). *Michael Amaladoss dan teologi perjuangan dari Filipina*. *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 2(1).
- Liu, J. H., & Gastardo-Conaco, C. (2011). *Theory and methods of a representational approach to understanding social movements: The role*

of the EDSA revolution in a national psychology of protest for the Philippines.

- Mangibin, F. M. (2011). *The EDSA revolution(s) and freedom: Hegelian interpretation of history*. Silliman University, Dumaguete City.
- McCoy, A. W. (2009). *An anarchy of families: State and family in the Philippines*. University of Wisconsin Press.
- Pangalangan, R. C. (Ed.). (2002). *Law and newly restored democracies: The Philippines experience in restoring political participation and accountability*. IDE Asian Law Series No. 13, Law and Political Development in Asia (Philippines).
- Quimpo, N. (2016). *People power and its legacies: The EDSA revolution*. Southeast Asian Studies Journal.
- Reyes, R. S. M. (2013). *The experience of difference: Re-thinking the EDSA revolution as an exemplar of ascending life*. *Tattva - Journal of Philosophy*, 5(1), 91.
- Santos, R. (2020). *Revolusi EDSA: Gerakan rakyat melawan rezim otoriter di Filipina*. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 5(2), 45-67.
- Setyowati, E. (2009). *Beberapa pendekatan teori kekerasan politik untuk memahami gerakan nirkekerasan di Filipina*.
- Thompson, M. R. (1995). *The anti-Marcos struggle: Personalistic rule and democratic transition in the Philippines*. Yale University Press.
- Thompson, M. R. (2010). *Democracy and disorder: Politics and society in post-EDSA Philippines*. *Southeast Asian Studies*, 47(3), 323-347.